



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OBAT NASIONAL (KONAS) DI ERA DIGITAL : LITERATUR REVIEW

Novega Diyan Al Amanah<sup>\*1</sup>, Nevi Nur Fitriasari<sup>2</sup>, Muhammad Anugerah Wijaya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Setia Budi, Surakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [s2nevinf@gmail.com](mailto:s2nevinf@gmail.com)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 04 Desember 2025</p> <p>Revised : 02 Januari 2026</p> <p>Accepted : 01 Februari 2026</p> <p>Publication : 28 Februari 2026</p>	<p><b>Abstract:</b> <i>The e-catalogue policy is part of Indonesia's National Drug Policy (KONAS) aimed at improving drug procurement efficiency in the National Health Insurance (JKN) era. This study analyzed the effectiveness of e-catalogue implementation on procurement efficiency, price transparency, and drug stock availability in healthcare facilities. A literature review with a descriptive qualitative approach was conducted using articles from Google Scholar, PubMed, and ScienceDirect published between 2019–2025. Data were analyzed through content analysis and narrative synthesis. The findings showed that e-catalogue implementation improved price transparency, standardized drug prices, and accelerated procurement processes. However, challenges such as delayed distribution, limited human resources, weak inventory management, and regional implementation disparities still affected drug availability. Strengthening distribution systems, information technology integration, and pharmaceutical workforce capacity are needed to optimize national drug policy implementation in the digital era.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> National Drug Policy, E-Catalogue, Drug Procurement, Drug Availability, National Health Insurance</p> <p><b>Kata Kunci:</b> KONAS, E-Catalogue, Pengadaan Obat, Ketersediaan Obat, JKN</p>	<p><b>Abstrak:</b> Kebijakan e-catalogue merupakan bagian dari Kebijakan Obat Nasional (KONAS) yang bertujuan meningkatkan efisiensi pengadaan obat pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi e-catalogue terhadap efisiensi pengadaan, transparansi harga, dan ketersediaan stok obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Metode yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelusuran artikel pada Google Scholar, PubMed, dan ScienceDirect tahun 2019–2025. Data dianalisis menggunakan content analysis dan sintesis naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-catalogue mampu meningkatkan transparansi harga, standarisasi biaya, dan mempercepat proses pengadaan obat. Namun, masih terdapat kendala berupa keterlambatan distribusi, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengelolaan stok, serta ketidaksesuaian implementasi di daerah yang memengaruhi ketersediaan obat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem distribusi, integrasi teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas tenaga farmasi untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan obat nasional di era digital.</p>
<p><b>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</b></p> 	

## INTRODUCTION

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan salah satu reformasi terbesar dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia dengan tujuan mencapai cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage*). Dalam pelaksanaannya, ketersediaan obat yang terjamin serta sistem pengadaan yang efisien menjadi aspek yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan. Formularium Nasional (Fornas) berfungsi sebagai daftar obat esensial yang wajib digunakan oleh fasilitas kesehatan dalam pelayanan JKN (Siregar, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan pengadaan obat Fornas harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Sebelum diterapkannya sistem *e-catalogue*, proses pengadaan obat di Indonesia masih menggunakan mekanisme tender konvensional yang membutuhkan waktu panjang dan berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, variasi harga yang tinggi, serta risiko keterlambatan penyediaan obat (Harahap & Sitorus, 2024). Perbedaan harga obat antar fasilitas kesehatan maupun antar wilayah juga masih sering ditemukan. Anggriani et al. (2013) menyatakan bahwa pada sektor pelayanan kesehatan publik maupun swasta, harga obat generik sering kali melebihi harga eceran maksimum yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, ketidaksesuaian antara kebutuhan obat dengan ketersediaan stok menyebabkan terjadinya kekosongan obat pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat mengganggu kontinuitas terapi pasien.

Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian menerapkan sistem *e-catalogue* sebagai bentuk pengendalian harga dan peningkatan transparansi pengadaan obat. Sistem ini memungkinkan pengadaan obat dilakukan secara elektronik dengan harga yang telah distandarisasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi biaya, mempercepat proses pengadaan, menekan potensi korupsi, serta meningkatkan ketersediaan obat di fasilitas kesehatan (Prasetyo & Wulandari, 2024). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan *e-catalogue* mampu menurunkan harga obat dan meningkatkan pengadaan obat yang termasuk dalam daftar *e-catalogue*, baik obat generik, obat nama dagang, maupun obat paten (Permata et al., 2020).

Meskipun demikian, implementasi *e-catalogue* masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi harga belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan ketersediaan stok obat. Masalah seperti

keterlambatan distribusi, kegagalan lelang, ketidaksesuaian antara Fornas dan *e-catalogue*, serta rendahnya kesiapan sistem logistik masih menjadi hambatan dalam pengadaan obat (Ariati, 2017). Selain itu, pada beberapa kelompok obat vital dengan harga tinggi, penerapan harga yang terlalu rendah berpotensi menurunkan minat pemasok dan meningkatkan risiko kekosongan obat (Wijaya, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada satu aspek efisiensi, yaitu efisiensi biaya atau ketersediaan stok secara terpisah. Padahal, efektivitas sistem pengadaan obat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menurunkan harga, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kesinambungan pasokan obat di fasilitas kesehatan. Penelitian Satibi et al. (2022) menunjukkan bahwa implementasi *Universal Health Coverage* memberikan dampak yang berbeda pada tiap kelompok terapi obat sehingga diperlukan evaluasi yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara efisiensi harga dan ketersediaan stok obat setelah penerapan sistem *e-catalogue*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan *e-catalogue* terhadap efisiensi pengadaan obat, khususnya terhadap perubahan harga obat dan tingkat ketersediaan stok obat Fornas sebelum dan sesudah penerapan sistem *e-catalogue*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan *e-catalogue* sebagai sistem pengadaan obat dalam mendukung keberlanjutan pelayanan kesehatan di era JKN.

## **METHOD**

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan e-Catalogue terhadap pengadaan obat pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terkait efektivitas sistem *e-catalogue* dalam meningkatkan efisiensi pengadaan, ketersediaan obat, serta kualitas pelayanan kefarmasian pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Objek penelitian dalam kajian ini adalah artikel ilmiah yang membahas pengadaan obat berbasis *e-catalogue*, *e-purchasing*, pengelolaan obat program JKN, serta implementasi kebijakan farmasi nasional di rumah sakit dan puskesmas. Pencarian artikel dilakukan secara elektronik menggunakan database ilmiah seperti *Google Scholar*, *PubMed*, dan *ScienceDirect*. Kata kunci yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mencakup: "*e-catalogue obat*", "*pengadaan obat JKN*",

"*efisiensi e-purchasing*", "*drug procurement policy Indonesia*", dan "*kebijakan obat nasional*". Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan artikel berdasarkan kesesuaian topik, tujuan penelitian, tahun publikasi, dan kelengkapan data penelitian.

Kriteria inklusi artikel meliputi:

1. Artikel membahas implementasi *e-catalogue* atau *e-purchasing* dalam pengadaan obat;
2. Artikel membahas efisiensi pengadaan, ketersediaan stok obat, atau pengelolaan obat program JKN;
3. Artikel dipublikasikan pada rentang tahun 2019–2025;
4. Artikel tersedia dalam bentuk full text dan berasal dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional.

Sementara itu, artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pengadaan obat elektronik, artikel duplikat, serta artikel yang tidak dapat diakses secara lengkap dikeluarkan dari proses analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, mengidentifikasi, dan menelaah isi artikel ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kendala implementasi *e-catalogue*, serta dampaknya terhadap efisiensi dan ketersediaan obat.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan naratif. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan penelitian berdasarkan tema utama, yaitu efisiensi pengadaan obat, transparansi harga, ketersediaan stok obat, kendala implementasi, serta faktor sumber daya manusia dan distribusi obat. Selanjutnya, hasil dari berbagai penelitian dibandingkan dan disintesis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan *e-catalogue* dalam sistem pengadaan obat di Indonesia.

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **Results**

Berdasarkan hasil telaah dari berbagai artikel, implementasi sistem *e-catalogue* dalam pengadaan obat menunjukkan dampak yang cukup signifikan terhadap efisiensi pengadaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Secara umum, kebijakan ini mampu meningkatkan transparansi harga, mempercepat proses pengadaan, dan menekan biaya pembelian obat.

Penelitian Wulandari dan Utomo (2025) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-catalogue* pada pengadaan obat Fornas menghasilkan penurunan harga obat sebesar 18,13% setelah implementasi kebijakan. Selain itu, terjadi standarisasi harga obat yang lebih baik dibandingkan sebelum penerapan sistem elektronik. Namun demikian, peningkatan ketersediaan stok obat masih tergolong rendah, yaitu hanya meningkat sebesar 2,7%, sehingga belum mampu menjamin keberlanjutan ketersediaan obat esensial secara optimal.

Penelitian Permata dkk. (2020) di RSUP Fatmawati menunjukkan bahwa persentase pengadaan obat melalui *e-catalogue* mengalami peningkatan setelah kebijakan diterapkan. Pengadaan obat *e-catalogue* meningkat dari kisaran 10,0–17,2% menjadi 20,0–29,4%. Peningkatan juga terjadi pada pengadaan obat generik, obat bermerek, dan obat paten yang masuk dalam daftar *e-catalogue*. Sebaliknya, pengadaan obat non *e-catalogue* mengalami penurunan setelah implementasi kebijakan.

Hasil penelitian Junaedi dkk. (2025) di RSUD dr. Dradjat Prawiranegara menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *e-Catalogue* tahun 2023 memberikan pengaruh positif terhadap pola pengadaan obat. Pengadaan obat melalui *e-catalogue* meningkat dari 31,51% menjadi 50,68%, sedangkan pengadaan non *e-catalogue* menurun dari 68% menjadi 49%. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya perbaikan waktu tunggu pengadaan obat, baik pada obat *e-catalogue* maupun non *e-catalogue*.

Sementara itu, penelitian Anggriani dkk. (2020) mengenai evaluasi perencanaan dan pengadaan obat di Puskesmas Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa kesesuaian antara pengadaan obat dengan Fornas mencapai 77,01%, sedangkan pengadaan obat berbasis *e-catalogue* baru mencapai 32,44%. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi sistem *e-catalogue* di tingkat pelayanan primer masih belum optimal.

Penelitian Nugraha dan Pujiyanto (2023) mengungkapkan bahwa kendala utama dalam pengadaan obat program JKN meliputi keterbatasan sumber daya manusia, proses perencanaan yang belum optimal, hambatan dalam *e-purchasing*, perbedaan harga pada sistem, serta keterlambatan distribusi obat oleh penyedia. Selain itu, masih ditemukan penggunaan sistem stok obat secara manual yang menyebabkan pengelolaan persediaan belum berjalan secara efektif.

Penelitian Sulistiyono dkk. (2020) juga menemukan bahwa kegagalan proses *e-purchasing* di beberapa puskesmas menyebabkan terjadinya kekosongan obat antihipertensi. Puskesmas yang memiliki apoteker sebagai penanggung jawab

pengadaan obat cenderung lebih berhasil memenuhi kebutuhan obat dibandingkan puskesmas yang tidak melibatkan apoteker secara aktif.

Penelitian internasional oleh Fanda dkk. (2025) menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah berhasil meningkatkan akses obat melalui sistem JKN dan kebijakan nasional obat, masih terdapat ketimpangan akses dan kejadian *stockout* di berbagai daerah, terutama di luar Pulau Jawa dan Bali. Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan kapasitas tenaga farmasi, lemahnya sistem distribusi, serta ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi *e-catalogue* memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi pengadaan obat melalui peningkatan transparansi harga, standarisasi biaya, dan percepatan proses pengadaan. Namun demikian, berbagai kendala masih ditemukan dalam implementasi kebijakan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, distribusi obat, sistem pengelolaan stok, dan ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat daerah.

## **Discussion**

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *e-catalogue* memberikan dampak positif terhadap sistem pengadaan obat di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan efisiensi pengadaan, transparansi harga, dan standarisasi biaya obat. Sistem *e-catalogue* menjadi salah satu bentuk transformasi digital dalam tata kelola pengadaan obat yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan adanya sistem elektronik tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan dapat melakukan pengadaan obat secara lebih cepat, transparan, dan terintegrasi dibandingkan metode pengadaan konvensional.

Peningkatan penggunaan sistem *e-catalogue* pada fasilitas pelayanan kesehatan menunjukkan adanya adaptasi terhadap sistem pengadaan berbasis elektronik. Penelitian Junaedi et al. (2025) menunjukkan bahwa penggunaan pengadaan obat melalui *e-catalogue* meningkat secara signifikan setelah implementasi kebijakan dilakukan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sistem *e-catalogue* mampu membantu fasilitas kesehatan dalam memilih penyedia obat berdasarkan harga dan spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah sehingga proses pengadaan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, peningkatan penggunaan obat generik pada sistem *e-catalogue* juga menunjukkan bahwa kebijakan ini mendukung upaya pengendalian biaya pelayanan kesehatan nasional.

Implementasi *e-catalogue* juga memberikan pengaruh terhadap transparansi harga obat dan efisiensi penggunaan anggaran kesehatan. Sistem ini memungkinkan pemerintah melakukan standarisasi harga obat secara nasional sehingga dapat meminimalkan variasi harga antar fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Anggriani et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pengadaan obat berbasis *e-catalogue* mendukung efektivitas dan efisiensi pengadaan obat di puskesmas melalui pengendalian biaya dan peningkatan ketepatan pengadaan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *e-catalogue* belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan masih terjadinya *stockout* obat akibat keterlambatan distribusi, keterbatasan persediaan dari penyedia, serta ketidaksesuaian antara kebutuhan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan obat dalam sistem *e-catalogue*. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi finansial yang dihasilkan oleh sistem *e-catalogue* belum sepenuhnya diimbangi oleh efisiensi logistik dan distribusi obat.

Permasalahan lain yang ditemukan dalam implementasi kebijakan adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan obat dan penggunaan sistem elektronik. Penelitian Nugraha dan Pujiyanto (2023) menunjukkan bahwa beberapa rumah sakit masih menggunakan sistem stok obat secara manual dan belum menerapkan metode pengendalian persediaan seperti VEN-ABC secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses perencanaan kebutuhan obat menjadi kurang akurat dan meningkatkan risiko terjadinya kekosongan maupun kelebihan stok obat. Selain itu, keterbatasan kemampuan tenaga farmasi dalam pengelolaan logistik obat turut memengaruhi efektivitas implementasi *e-catalogue* di fasilitas pelayanan kesehatan.

Faktor distribusi obat juga menjadi tantangan penting dalam implementasi *e-catalogue*. Beberapa penelitian menunjukkan adanya keterlambatan pengiriman obat oleh distributor, keterbatasan stok dari penyedia, serta kendala teknis dalam proses *e-purchasing* yang menyebabkan pengadaan obat tidak berjalan optimal. Dalam kondisi tertentu, fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pengadaan obat di luar sistem *e-catalogue* untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pengadaan elektronik tidak hanya bergantung pada sistem

teknologi informasi, tetapi juga pada kesiapan rantai distribusi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam sistem kesehatan.

Selain aspek teknis dan logistik, implementasi kebijakan obat nasional juga dipengaruhi oleh faktor motivasi dan kualitas sumber daya manusia. Penelitian Tahir et al. (2019) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan obat nasional memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan motivasi kerja tenaga kesehatan di rumah sakit pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengadaan obat tidak hanya dipengaruhi oleh sistem pengadaan, tetapi juga oleh komitmen, kompetensi, dan motivasi tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kefarmasian.

Secara keseluruhan, implementasi *e-catalogue* telah memberikan kontribusi positif terhadap sistem pengadaan obat di Indonesia, terutama dalam aspek efisiensi biaya, transparansi pengadaan, dan pengendalian harga obat. Namun demikian, optimalisasi implementasi kebijakan masih memerlukan perbaikan pada aspek distribusi obat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem informasi, serta pengawasan terhadap ketersediaan stok obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya perbaikan yang berkelanjutan, kebijakan *e-catalogue* diharapkan mampu mendukung terciptanya sistem pengadaan obat yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung pelayanan kesehatan nasional.

## CONCLUSION

Implementasi kebijakan *e-catalogue* dalam pengadaan obat di Indonesia memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi sistem pengadaan obat, terutama dalam aspek transparansi harga, standarisasi biaya, dan percepatan proses pengadaan pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem elektronik mampu meningkatkan penggunaan pengadaan obat berbasis *e-catalogue* serta mendukung pengendalian biaya pelayanan kesehatan melalui optimalisasi penggunaan obat generik dan obat Formularium Nasional (Fornas).

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal dalam menjamin ketersediaan obat secara berkelanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan. Berbagai kendala masih ditemukan, seperti keterlambatan distribusi obat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya sistem pengelolaan stok, serta ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat daerah.

Selain itu, beberapa fasilitas pelayanan kesehatan masih menghadapi hambatan dalam penerapan *e-purchasing* dan integrasi sistem informasi logistik obat.

Berdasarkan hasil *literature review* ini, keberhasilan implementasi kebijakan obat nasional di era digital tidak hanya bergantung pada sistem teknologi pengadaan, tetapi juga memerlukan penguatan manajemen rantai pasok, peningkatan kompetensi tenaga farmasi, integrasi sistem informasi kesehatan, serta pengawasan distribusi obat yang lebih efektif. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, sistem *e-catalogue* diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola pengadaan obat yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan nasional.

## REFERENCES

- Erfan Chandra Nugraha, & Pujiyanto. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN OBAT PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RS X WILAYAH BANDUNG BARAT. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(12), 2450–2457. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i12.4162>
- Fanda, R. B., Probandari, A., Kok, M. O., & Bal, R. A. (2025). MANAGING MEDICINES IN DECENTRALIZATION: DISCREPANCIES BETWEEN NATIONAL POLICIES AND LOCAL PRACTICES IN PRIMARY HEALTHCARE SETTINGS IN INDONESIA. *Health Policy and Planning*, 40(3), 346–357. <https://doi.org/10.1093/heapol/czae114>
- Hassali, M. A., Alrasheedy, A. A., McLachlan, A., Nguyen, T. A., AL-Tamimi, S. K., Ibrahim, M. I. M., & Aljadhey, H. (2014). THE EXPERIENCES OF IMPLEMENTING GENERIC MEDICINE POLICY IN EIGHT COUNTRIES: A REVIEW AND RECOMMENDATIONS FOR A SUCCESSFUL PROMOTION OF GENERIC MEDICINE USE. *Saudi Pharmaceutical Journal*, 22(6), 491–503. <https://doi.org/10.1016/j.jsps.2013.12.017>
- Junaedi, C., Anggriani, Y., Abillah, S., Sari, R. P., Studi, P., Farmasi, M., & Pancasila, U. (2025). IMPACT OF 2023 E-CATALOGUE POLICY ON DRUG PROCUREMENT. *Jurnal Farmasi Lampung*, 14(2), 31–43.
- Kasim, M. (2019). THE EFFECT OF NATIONAL DRUG POLICY IMPLEMENTATION AND APPARATUS WORK MOTIVATION ON

HEALTH SERVICE QUALITY IN THE GOVERNMENT HOSPITALS OF GORONTALO. *Public Policy and Administration Research*, 9(6), 59–71. <https://doi.org/10.7176/ppar/9-6-07>

- Laili, F. N., Octavia, D. R., & Muhtaromah, M. (2023). HUBUNGAN KEPATUHAN PENGOBATAN TB-RO TERHADAP OUTCOME TERAPI PASIEN TUBERKULOSIS DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH LAMONGAN: CORRELATION BETWEEN TUBERCULOSIS DRUG RESISTENCE TREATMENT COMPLIANCE AND OUTCOME OF TUBERCULOSIS THERAPY PATIENTS AT MUHAMMADIYAH LAMONGAN HOSPITAL. *Jurnal Sains dan Kesehatan*, 5(5), 659–665.
- Permata, S., Anggriani, Y., & Lesilolo, M. S. (2020). ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN E-CATALOGUE TERHADAP PROFIL PENGADAAN OBAT DI INSTALASI FARMASI RSUP FATMAWATI. *PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia (Pharmaceutical Journal of Indonesia)*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.30595/pharmacy.v17i1.4682>
- Sulistiyono, H., Sarnianto, P., & Anggiani, Y. (2020). THE IMPACT OF MEDICINE PROCUREMENT POLICIES ON COMMUNITY HEALTH CENTRES IN JAKARTA DURING THE NATIONAL HEALTH INSURANCE ERA. *Window of Health Jurnal Kesehatan*, 3(4), 295–307.
- Wulandari, S., & Bram Mustiko Utomo. (2025). EFFICIENCY OF FORNAS DRUG PROCUREMENT VIA E-CATALOGUE: COMPARATIVE ANALYSIS OF PRICE AND STOCK AVAILABILITY BEFORE AND AFTER MANDATE. *Journal of Health Service Administration and Hospital Management*, 1(1), 32–44. <https://doi.org/10.69855/jhsah.v1i1.360>